

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN **SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453192, Fax. (0411) 453489 MAKASSAR 90231

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 591/III/TAHUN 2021

## TENTANG

## PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19

1.

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
   Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 4. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

- 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
- 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86
  Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
  dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
  Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
  Selatan Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah
  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
  Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2021
  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
  Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang
  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
  (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
  Nomor 16);
- 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 277/I/Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Untuk Menandatangani Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dengan Agenda

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan

berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja

untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk

kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda

Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Keputusan

ini

dan

Lampiran

pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

sebagaimana

KEEMPAT : Kepada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul

pada

atau terkait langsung secara substansi dengan agenda

Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama

dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya

yang dipandang perlu, dan memperhatikan

tahapan/mekanismenya sesuai ketentuan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan

agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala

Daerah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini,

dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui

DPA-OPD/Unit Kerja masing-masing pada Tahun Anggaran

2021 sesuai ketentuan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 66/I/TAHUN 2021 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 1 Maret 2021

a.n. GUBERNUK SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.

Pangkat Pembina Utama

NIP. 19650405 199010 1 002

#### Tembusan:

1. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

2. Para Kepala SKPD dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Tempat.

3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 591/III/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

# RANPERGUB DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	TENTANG	MATERI POKOK	_	TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			<b>✓</b>		BKD	2021	
2.	Iuaran Anggota dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana Korps Pegawai RI Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		✓			BKD	2021	
3.	Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah 2018-2023		<b>√</b>			BAPELITBANGDA	2021	
4.	Pendidikan Anti Korupsi		✓			INSPEKTORAT	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	КЕТ
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Pedoman Pengaturan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara		✓			BKD	2021	
6.	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Dan Swasta Tahun 2021	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta				DISDIK	2021	
7.	Pengembangan Pendidikan Vokasi Menengah Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Sulawesi Selatan	Melaksanakan Peraturan Presiden	<b>√</b>			DISDIK	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK	_	TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	КЕТ
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
		tentang Pengembangan Pendidikan Vokasi Menengah Sekolah Menengah Kejuruan di Sulawesi Selatan						
8.	Eksistensi Dan Efektifitas Pengelolaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Bagi Anak	Pelibatan masyarakat dan Pemda Kabupaten Kota dalam meningkatkan Kualitas SLB di Sulawesi Selatan	<b>√</b>			DISDIK	2021	
9.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan			<b>√</b>		DISDIK	2021	
10.	Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi		<b>√</b>			DPMPTSP	2021	
11.	Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselba		<b>√</b>			DPMPTSP	2021	
12.	Rencana Umum Penanaman Modal		<b>√</b>			DPMPTSP	2021	
13.	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta		<b>√</b>			Bakesbangpol	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perlindungan Masyarakat							
14.	Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023		<b>√</b>			DP3A	2021	
15.	Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan		<b>√</b>			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2021	
16.	Perubahan Pergub Nomor 108 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSKD Pada Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan			<b>*</b>		Biro Organisasi	2021	
17.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan			<b>√</b>		Biro Organisasi	2021	
18.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan		<b>√</b>			Biro Organisasi	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	Pencabutan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur kepada Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan		<b>√</b>			Biro Organisasi	2021	
20.	Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Rumah Sakit Apung		<b>√</b>			Biro Organisasi	2021	
21.	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024		<b>√</b>			Biro Organisasi	2021	
22.	Perubahan Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum			<b>√</b>		BAPENDA	2021	
23.	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan		<b>√</b>			BAPENDA	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	КЕТ
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan							
24.	Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		✓			BKAD	2021	
25.	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		<b>√</b>			BKAD	2021	
26.	Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		<b>√</b>			BKAD	2021	
27.	Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		<b>~</b>			BKAD	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
28.	Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah		<b>√</b>			BKAD	2021	
29.	Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran		<b>√</b>			BKAD	2021	
30.	Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Sipil Negara		<b>√</b>			BKAD	2021	
31.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021		<b>✓</b>			BKAD	2021	
32.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021			<b>√</b>		BKAD	2021	
33.	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Gangguan Keamanan serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan		<b>√</b>			BKAD	2021	
34.	Pedoman Umum Penggunaan Dana Stimulan bagi Juara Lomba Desa dan Kelurahan		<b>√</b>			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2021	

No	TENTANG	MATERI POKOK		TUS 4)	PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan							
35.	Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023		✓			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2021	
36.	Pedoman Pengelolaan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		✓			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2021	
37.	Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2021	
38.	Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan		<b>✓</b>			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2021	
39.	Pedoman Umum Pelaksanaan Program Prioritas Pengembangan Budidaya Udang Windu Ramah Lingkungan Berbasis Kawasan		<b>✓</b>			Bappelitbangda	2021	

No	TENTANG (2)	MATERI POKOK	STATUS (4)		PELAKSANAAN	PD/Unit Kerja	TARGET PENYAMPAIAN	KET
(1)		(3)	BARU	UBAH	(5)	(6)	(7)	(8)
40.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Keterangan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			<b>√</b>		BKD	2021	

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Penamaan Peraturan Gubernur

Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Gubernur

Kolom 4 : Penyusunan status Peraturan Gubernur dengan memilih apakah Pergub baru dibuat atau Pergub

perubahan.

Kolom 5 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Gubernur, meliputi:

- Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- rencana pembangunan daerah;

- penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; atau

- aspirasi masyarakat daerah.

Kolom 6 : SKPD/Unit kerja terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Gubernur

Kolom 7 : Tahun penyelesaian Peraturan Gubernur

Kolom 8 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Gubernur

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama

NIP. 19650405 199010 1 002